

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Reformasi pada keuangan negara telah memberikan pengaruh yang cukup besar dalam proses pengelolaan keuangan negara. Reformasi ini ditandai dengan ditetapkannya paket undang-undang keuangan negara yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Negara. Pengaruh dari reformasi keuangan tersebut kemudian dirasakan pada penerapan dari kebijakan standar akuntansi pemerintahan (SAP) di Indonesia. Sebelum tahun 2003, standar akuntansi pemerintahan di Indonesia menggunakan akuntansi berbasis kas dalam pengelolaan keuangan negara. Setelah dikeluarkannya paket undang-undang keuangan negara, pemerintah mewajibkan tiap instansi pemerintahan yang ada di pusat dan daerah untuk menggunakan akuntansi berbasis akrual (Hariyanto, 2014).

Proses penetapan peralihan dari akuntansi berbasis kas menuju akrual tentunya memerlukan penyesuaian sehingga digunakan basis kas menuju akrual atau yang dikenal dengan *cash towards accrual* seperti yang tercantum pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Di akhir

2010, pemerintah kemudian menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan implementasi akuntansi kebijakan akuntansi menggunakan basis akrual. Kebijakan ini menyatakan bahwa pelaporan keuangan dengan basis akrual paling lambat dapat dilaksanakan bertahap untuk penerapan penuhnya pada 2015 (Ramdani, 2016).

Penetapan pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 membawa perubahan pada laporan keuangan pemerintah. Perubahan ini merujuk pada tambahan laporan keuangan baru yang berupa Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Laporan Saldo Anggaran Kurang/Lebih (Shanti, 2018). Menurut definisinya, laporan keuangan dapat diartikan sebagai laporan yang memberikan informasi mengenai kondisi keuangan pada entitas pelaporan (Bintaurina et al., 2021). Pada laporan keuangan pemerintah terdapat laporan operasional. Laporan operasional adalah bagian dari laporan keuangan pemerintah pusat yang memberikan informasi tentang sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas. Penggunaan sumber daya ekonomi ini diatur oleh pemerintah pusat untuk satu kegiatan periode pelaporan (Hasanah & Fauzi, 2017). Pada laporan operasional terdapat struktur yang berupa pendapatan-LO, beban, transfer, dan pos-pos luar biasa. Informasi lebih lanjut terkait LO dijelaskan lebih lanjut pada lampiran I PSAP 12 tentang standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual.

Implementasi SAP dengan menggunakan basis akrual secara penuh memerlukan adaptasi yang cukup lama dari basis sebelumnya yaitu penggunaan basis kas dengan dijumpai oleh basis kas menuju akrual. Adaptasi yang cukup lama terjadi karena adanya permasalahan dari sumber daya manusia, kebijakan

yang ada, dan teknologi informasi yang tersedia. Berdasarkan pemeriksaan BPK hingga tahun 2013, hanya ditemukan satu instansi pemerintah daerah yang mengimplementasikan basis akrual pada laporan keuangannya. Pada tahun 2014, penggunaan basis akrual kemudian meningkat menjadi sembilan instansi pemerintah daerah yang berarti hanya 1,67% yang dapat mengadopsi basis akrual pada saat menyajikan laporan keuangan. Dengan data yang diperoleh, maka disimpulkan bahwa implementasi ini belum sepenuhnya efektif sehingga turut berpengaruh juga pada terkendalanya penyajian LO sebagai bagian dari Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Laporan Operasional merupakan salah satu dari bagian laporan keuangan yang wajib disusun baik oleh entitas akuntansi atau pelaporan termasuk Kantor Wilayah DJPB Provinsi Lampung (Kanwil DJPb Provinsi Lampung). Laporan Operasional memiliki peranan penting karena LO memiliki manfaat berupa penyediaan informasi pada seluruh aktivitas operasional keuangan yang berada pada kantor wilayah. Informasi tersebut dapat dilihat dari struktur atau pos-pos yang ada pada LO. LO setidaknya disajikan sekali dalam setahun dengan membandingkan LO dari periode sebelumnya.

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan di atas, penulis berminat untuk melakukan tinjauan atas penyusunan Laporan Operasional pada tingkat kantor wilayah. Penulis akan memilih Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Lampung sebagai objek dari penulisan Karya Tulis Tugas Akhir. Hasil dari tulisan akan dipaparkan dalam Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA)

dengan judul “Tinjauan atas Penyajian Laporan Operasional Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Lampung”.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan penulis sajikan dalam Karya Tulis Tugas Akhir ini yaitu:

1. Bagaimana kesesuaian pada penyajian Laporan Operasional Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Lampung terhadap kebijakan akuntansi dan peraturan yang berlaku?
2. Apakah ditemukan kendala pada saat penyusunan Laporan Operasional di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Lampung?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan dari KTTA ini adalah:

1. Meninjau kesesuaian penyajian Laporan Operasional Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Lampung terhadap kebijakan akuntansi dan peraturan yang berlaku.
2. Mengetahui kendala pada saat penyusunan Laporan Operasional di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Lampung.

1.4 Ruang Lingkup

Untuk membatasi ruang lingkup pada penulisan, karya tulis ini akan membahas tinjauan implementasi atas Laporan Operasional pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Lampung. Periode yang digunakan ialah pada tahun anggaran 2020. PSAP Nomor 12 tentang Laporan Operasional yang berada lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 dan PMK No.

225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat akan menjadi pedoman pada saat meninjau mengenai Laporan Operasional yang disajikan. Tinjauan ini akan digunakan untuk menilai kesesuaian saat penerapan dengan peraturan dan kebijakan yang berlaku.

1.5 Manfaat Penulisan

Penulisan dari KTTA ini harapannya dapat memberikan manfaat pada pihak-pihak yaitu:

1. Sebagai bahan dalam menambah wawasan dan ilmu bagi penulis tentang peraturan dan kebijakan yang berlaku sewaktu menyajikan Laporan Operasional pada saat implementasi di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Lampung sesuai dengan SAP berbasis akrual.
2. Sebagai gambaran bagi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Lampung dalam melihat kesesuaian implementasi atas penyusunan Laporan Operasional dengan aturan dan kebijakan pada SAP berbasis akrual.

1.6 Sistematika Penulisan KTTA

Sistematika penulisan pada KTTA ini terdiri atas empat bab dan setiap bab terdiri dari subbab-subbab. Isi dari setiap bab adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan akan berisi uraian dari gambaran umum pada karya tulis yang akan disusun. Gambaran umum mencakup rumusan masalah, ruang lingkup, pembahasan, serta manfaat penulisan dari karya tulis tugas akhir ini.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini, penulis akan menjelaskan landasan teori yang digunakan untuk menjadi dasar dari penyusunan Laporan Operasional seperti teori-teori tentang aturan dan kebijakan yang berlaku pada penerapan akuntansi penyajian Laporan Operasional. Dasar pada saat melakukan tinjauan atas implementasi penyajian Laporan Operasional akan berpedoman pada teori-teori yang dijelaskan sebelumnya.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan metode yang digunakan saat mengumpulkan data dan gambaran umum tentang objek karya tulis yaitu Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Lampung. Pada bab ini, penulis akan menguraikan profil umum yang mencakup sejarah, visi dan misi, struktur organisasi, serta tugas pokok dan fungsi pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Lampung. Selain itu, bab ini akan menjelaskan hasil dari tinjauan laporan operasional pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Lampung.

BAB IV SIMPULAN

Bab ini berisi simpulan dan saran dari penjelasan yang telah dijabarkan pada bab-bab sebelumnya. Simpulan yang dibuat memuat penjelasan yang telah dibahas. Saran yang mendukung perbaikan juga akan disampaikan pada bab ini. Harapannya saran tersebut dapat bermanfaat pada penerapan penyajian Laporan Operasional di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Lampung.